

Kerancauan Berfikir HTI Dalam Bernegara dan Beragama

written by Harakatuna

Kerancauan Berfikir HTI Dalam Bernegara dan Beragama

Oleh: Romdani*

Beberapa waktu lalu, Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengumumkan rencana Pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir [Indonesia](#) (HTI). Atas dasar itu, Pemerintah pun melarang [HTI](#) melakukan kegiatan. Pemerintah berpandangan, kegiatan [HTI](#) terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah [hukum](#) secara tegas untuk membubarkan [HTI](#),” kata Wiranto seperti diberitakan Kompas.com, Senin (8/5/17).

Beberapa alasan kemudian dikemukakan Pemerintah untuk menguatkan argumen bahwa [HTI](#) layak dibubarkan. Di antaranya: [HTI](#) sebagai ormas berbadan [hukum](#) tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan yang dilakukan [HTI](#) terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan [HTI](#) dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat.

Dalam tulisan ini, saya tidak akan menguraikan [hukum](#) karena saya bukan ahli [hukum](#), saya kuliah fakultas [hukum](#) tidak lulus. Saya juga tidak akan mengeluarkan jurus dalil Alquran atau hadis. Tahulah, saya bukan [ulama](#), kiai, ustad. Saya cuma bubuk rengginang yang sedang curhat karena Pancasila yang sudah puluhan tahun mempersatukan [Indonesia](#) dipersoalkan, digoyang-goyang, dan ingin digantikan. Sebab, kata Gus Ishom, apakah negara akan menyerahkan begitu saja negara ini ke para khilafis, gratis gitu? Ya kagaklah, pasti ada perlawanan, perang, dan saya si bubuk rengginang ini ingin damai tentram gemah ripah loh jinawi ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada, tut wuri handayani.



Lanjut, poin-poin itulah yang membuat Pemerintah berani menempuh jalur [hukum](#) membubarkan [HTI](#). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Ormas, hanya pengadilan-lah yang berwenang memutus suatu ormas layak dibubarkan atau tidak. Karena itulah, mungkin, Wiranto dalam pernyataannya mengatakan, akan mengambil langkah-langkah [hukum](#).

Ini bisa berarti, Pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan mengajukan permohonan pembubaran Ormas [HTI](#) ke Pengadilan. Di situlah, pertarungan [hukum](#) antara Pemerintah dan [HTI](#) yang sebenarnya. [HTI](#) bahkan sudah menyiapkan 1000 pengacara di bawah komando Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra.

Pasca pengumuman dari Pemerintah, pro-kontra pun menyeruak. Banyak pihak angkat jempol dan mendukung penuh langkah pemerintah. Meski, ada juga yang mengkritisi Pemerintah dengan menyebut, Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membubarkan ormas. Pemerintah, kata kubu yang menolak, tidak punya hak membubarkan ormas. Sebab yang berhak hanya pengadilan. Selain itu, [HTI](#) juga mengklaim sebagai organisasi yang legal yang memiliki SK dari Kemenkum HAM.

Kubu yang setuju [HTI](#) dibubarkan, jelas menganggap [HTI](#) sangat pantas dibubarkan. Sebab, [HTI](#) dianggap menolak Pancasila. Dasarnya, [HTI](#) dalam setiap kegiatannya, selalu menggaungkan diterapkannya sistim negara [khilafah](#). [HTI](#) juga disebut-sebut menolak demokrasi. Meski belakangan, [HTI](#) membantah itu semua. [HTI](#) menyatakan, mereka tidak anti Pancasila.

[HTI](#) tentu saja menolak keras rencana Pemerintah. [HTI](#) siap melakukan perlawanan terhadap Pemerintah. Perlawanan apa yang akan dilakukan [HTI](#)? Tentu saja perlawanan [hukum](#). Hah, perlawanan [hukum](#)? Iya, perlawanan [hukum](#).

Seandainya saya [HTI](#), jujur saya akan saya abaikan rencana pembubaran itu. Saya tidak akan sibuk-sibuk mengumpulkan pengacara untuk tarung di pengadilan. Saya akan cuek bebek dan tidak akan mengeluarkan penolakan atau bantahan atas rencana pembubaran itu. Kenapa? Lha wong saya sebagai [HTI](#) menolak demokrasi, menolak [hukum](#) di [Indonesia](#), dan menolak Pancasila.

Seandainya saya kader [khilafah](#), saya tidak merasa perlu mendaftarkan diri ke

Kemenkum HAM atau Kemendagri. Saya tidak akan memiliki KTP. Saya tidak akan menggunakan uang rupiah. Dan saya ogah menikah di KUA yang maksudnya memiliki buku nikah. Saya tidak akan menyekolahkan anak saya di mana ;pun di negeri ini. Sebab, semuanya itu thagut, lambang burung kok diagung-agungkan, Pancasila kok disakralkan, kafir antum.

Sebagai khilafis, seharusnya saya total menolak eksistensi negara ini. Jadi apa urusannya Pemerintah mau membubarkan saya. Emang gue mengakui lo, hey Pemerintah? Mau dibubarin kek, diberangus kek, ana tidak peduli, ana itu ingin sistim [khilafah](#) ditegakkan, diterapkan. Ana kagak mengakui Pancasila, UUD NRI 1945, Undang-Undang, dan demokrasi, jadi persetan rencana pembubaran itu.

Tapi, di sinilah lucunya [HTI](#). Di satu sisi [HTI](#) gambar-gembor ingin mendirikan negara [khilafah](#). Ingin mengganti Pancasila dan menolak demokrasi berikut [hukum-hukum](#) di [Indonesia](#), tapi kelenger dengar rencana Pemerintah mau membubarkan. Lalu bilang, Pemerintah otoriter, melanggar HAM, melanggar Undang-Undang. Aduh, apakah Pemerintah saat ini sudah [khilafah](#)? Apakah HAM saat ini sesuai dengan syariat [Islam](#)? Apakah Undang-Undang/[hukum](#) itu bersumber dari [hukum Islam](#)? Lha kan, menurut [HTI](#) tidak. Semuanya thagut. Kenapa sekarang bicara HAM dan Undang-Undang? Kemarin ente getol tolak pemimpin kafir apa itu tidak melanggar HAM? Apa itu tidak melanggar Undang-Undang? Lalu antum jawab, tidak! Itu sesuai dengan konstitusi. Duh, pertama seharusnya bukan kata “tolak” yang digunakan tapi paling tidak “pilih calon yang ini jangan yang itu”, itu paling tidak lho. Kedua, kok antum bicara konstitusi? Bukankah antum menolaknya?

Dikutip dari website resmi [HTI](#), [khilafah](#) adalah kepemimpinan umum yang berlaku bagi seluruh umat Muslim di dunia. Menurut saya, konsep [khilafah](#) ini sangat utopis. Kenapa? Karena ingin mempersatukan seluruh muslim di dunia di bawah satu sistim, satu kepemimpinan. Atau saya curiga, ada agenda terselubung [HTI](#) yang ingin menguasai dunia. Masih berdasarkan rilis [HTI](#) di website-nya, saat ini, di dunia, tidak ada sistim pemerintahan yang menggunakan sistim [khilafah](#). Sistim pemerintahan [khilafah](#) tidak sama dengan sistim pemerintahan di negara mana pun.

Menurut [HTI](#), kepala negara dalam sistim [khilafah](#) bukan raja atau diktator. Lalu apa? Kata [HTI](#), kepala negara dalam sistim [khilafah](#) adalah seseorang yang yang terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari umat [Islam](#). Otoritas yang

diberikan oleh umat [Islam](#) itu berdasarkan kontrak [politik](#) yang khas.

Di titik ini, saya mulai bingung dengan [HTI](#), kepala negara dalam sistim [khilafah](#) adalah dia yang terpilih. What? Terpilih? Maksudnya apa? Pemilihan umum-kah? [HTI](#) juga menyatakan, kepala negara tidak bisa memimpin jika tidak ber-baiat. Bukankah, jangankan kepala negara, kepala desa pun tidak bisa memimpin jika belum di-baiat atau disumpah.

Kontrak yang tertuang dalam baiat, kata [HTI](#), mengharuskan kepala negara (khalifah) berlaku adil sesuai syariat [Islam](#). Apa kepala negara Indonesia saat ini dengan sistim Pancasila tidak diharuskan berlaku adil? Atau jangan-jangan, [HTI](#) memiliki rumusan sendiri soal keadilan yang sesuai syariat [Islam](#). Ini berarti, seadil apa pun kepala negara [Indonesia](#) tetap dianggap tidak adil oleh [HTI](#).

[HTI](#) dengan sistim [khilafah](#) menginginkan, setiap Undang-Undang harus berasal dari [hukum Islam](#). [HTI](#) mungkin amnesia bahwa sebagian [hukum](#) di [Indonesia](#) dipengaruhi oleh [hukum Islam](#). Bukankah umat [Islam](#) di [Indonesia](#) sudah cukup diistimewakan? Lihat saja, adanya Pengadilan Agama yang mencakup permasalahan kekeluargaan, waris, dan keuangan [Islam](#). Ada Kompilasi [Hukum Islam](#). Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dan, ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang yang disebutkan terakhir baik langsung atau tidak langsung bernapaskan [Islam](#). Kurang [Islam](#) apa [Indonesia](#), ya akhi, ukhti?

[HTI](#) mengakui bahwa kepala negara dalam sistim [khilafah](#) tetaplah manusia biasa yang memiliki potensi salah. Untuk itu, kata [HTI](#), dalam sistim [khilafah](#) disediakan sarana check and balance guna memastikan kepala negara berada di jalur yang benar. Apa saat ini, di [Indonesia](#) tidak ada sarana itu? Apa saat ini di [Indonesia](#), kepala negara bebas berbuat sesuka hati? Tidak, antum!

Ini yang cukup mengerikan, [HTI](#) bilang, nasionalisme dan rasisme tidak memiliki tempat dalam sistim [Khilafah](#), haram [hukumnya](#). Soal rasisme, saat ini juga di [Indonesia](#) tidak mendapat tempat. Lalu soal Nasionalisme yang diharamkan tentu sangat ngawur. Bagaimana mungkin [Indonesia](#) bisa merdeka jika nasionalisme diharamkan. Pastilah kiai-kiai, [santri-santri](#), akan ogah melawan penjajah. Dan kalau [Indonesia](#) tidak merdeka, apa bisa antum mengibarkan bendera [HTI](#)? Ditembak pasukan kolonial yang ada.

Kepala negara atau khalifah bisa berasal dari golongan apa pun, ras mana pun,

intinya siapa saja boleh (asalkan [Islam](#)). Kanda [HTI](#), saat ini di [Indonesia](#), siapa pun boleh mencalonkan diri menjadi pemimpin. Buat apa repot-repot lagi mengganti Pancasila yang sudah bertahan puluhan tahun dengan [khilafah](#)?

Dan, ini poin menarik, [HTI](#) sudah pasti ingin mengganti sistem pemerintahan dan Pancasila. Karena [HTI](#) menginginkan sumber [hukum](#) mutlak dari [Islam](#) bukan Pancasila. Sistem republik juga sebisa mungkin akan dihapus dengan sistem [khilafah](#). Apa sebab? Karena republik amat sangat berbeda dengan [khilafah](#). Republik menggunakan instrumen demokrasi. Itulah intinya. [HTI](#) ogah menggunakan sistem demokrasi karena kata [HTI](#), demokrasi membuat kedaulatan berada di tangan rakyat. [HTI](#) ingin kedaulatan berada di tangan syariat. [Khilafah](#) merampas kedaulatan dari rakyat. Ih, ogah amat.

Sebuah anomali ketika [HTI](#) menolak Pancasila dan demokrasi. Karena, seandainya [Indonesia](#) bukan berdasarkan Pancasila dan sistem demokrasi, mana mungkin [HTI](#) bisa eksis. Sungguh konyol, menolak Pancasila dan demokrasi tapi diam-diam menikmatinya.

Setiap orang dalam Negara [Khilafah](#) berhak menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan negara tanpa harus merasa takut akan ditahan atau dipenjara. Itu kata [HTI](#). Akhi, uk^h[ti](#), apa saat ini di [Indonesia](#) tidak seperti itu? Antum juga bebas mengemukakan gagasan, penolakan, bahkan aksi turun ke jalan bukan? Apa saat ini [Indonesia](#) menggunakan [khilafah](#)? Tentu tidak.

Dalam sistem [Khilafah](#), [wanita](#) tidak berada pada posisi inferior atau menjadi warga kelas dua. [Islam](#) memberikan hak bagi [wanita](#) untuk memiliki kekayaan, hak pernikahan dan perceraian, sekaligus memegang jabatan di masyarakat. Itu juga argumentasi [HTI](#). Haduh, saya ingatkan lagi, di [Indonesia](#) saat ini, hal itu sudah diterapkan. Ingat, [Indonesia](#) pernah dipimpin kepala negara [wanita](#). Lalu hitung berapa banyak gubernur, bupati, walikota yang perempuan. Apa saat ini di [Indonesia](#) [wanita](#) dijadikan warga kelas dua, tiga, empat, dan seterusnya? Bahkan, ada mekanisme khusus soal kuota keterpilihan [wanita](#) dalam pemilihan legislatif, uk^h[ti](#).

Jadi, seandainya saya [HTI](#), saya akan berpikir, buat apa capek-capek ingin menerapkan sistem [khilafah](#)? [Indonesia](#) sudah [khilafah](#) banget. Pemilihan kepala negaranya terbuka, jujur, adil, rahasia, plus dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara juga disumpah di bawah Alquran (bagi muslim), artinya sama, sudah berb-

baiat untuk mengabdikan kepada rakyat. Kita bebas berpendapat bahkan menolak kebijakan yang dikeluarkan. Siapa saja boleh mencalonkan diri (bukan hanya [Islam](#)), makanya saya bilang [Indonesia](#) lebih khalifah daripada khalifah impian [HTI](#).

Seandainya saya [HTI](#), saya akan malu dan tahu diri saat ingin mendirikan negara [khilafah](#). Sebab, mungkin kakek saya, eyang saya, eyang istri saya, kakek mertua saya, buyut teman saya, atau guru ngaji saya berdarah-darah melawan penjajah. Untuk apa? Mendirikan negara [Indonesia](#) yang berdasar Pancasila bukan berdasar [khilafah](#). Saya juga tidak punya muka jika terus menggonggong ingin mendirikan [khilafah](#), sebab, saya bisa bicara seenak udel ya karena sistem demokrasi dan tentunya Pancasila bukan hilafah.

Ada masalah apa kalian, [HTI](#), dengan Pancasila, dengan demokrasi? Apa tidak bisa bicara baik-baik, bukankah itu [Islam](#) banget, musyawarah gitu sambil ngopi. Apa karena Pancasila dan demokrasi itu thagut, produk kafir, dan kalian inginkan yang benar-benar murni dari [Islam](#)? Cari saja tanah yang masih kosong yang tidak ada yang mengklaim, di kutub utara misalnya, silakan dirikan [khilafah](#) di sana.

Seandainya saya [HTI](#), bagi saya cukup Pancasila karena itu sudah [Islam](#) banget, [khilafah](#) banget.

*Penulis adalah aktivis Ansor, tinggal di Tangerang

Sumber

:

<http://www.muslimoderat.net/2017/06/kerancauan-hti-dalam-bernegara-yang-tak-masuk-akal.html#ixzz4j3RyaU7Y>